



RENCANA KERJA (RENJA)



**INSPEKTORAT
KABUPATEN LANGKAT**

TAHUN 2022



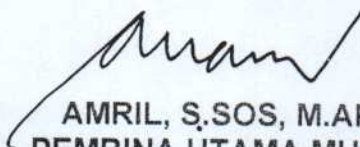
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)".

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pengawasan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Langkat. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Langkat telah merencanakan berbagai kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai sarana pencapaian tujuan seperti yang telah ditetapkan.

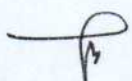
Dengan demikian, diharapkan Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara konsisten dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Stabat, 29 April 2021
INSPEKTUR KABUPATEN LANGKAT


AMRIL, S.SOS, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690927 199102 1 001.

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	 5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Langkat	17
2.3. Isu – isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Inspektorat Kabupaten Langkat	 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 27
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3. Program dan Kegiatan	28
3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 33
 BAB V PENUTUP	 39
 LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Langkat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan dibidang pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Langkat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rumusan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan adanya dukungan pendanaan yang cukup, maka diharapkan dapat digunakan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Langkat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun demikian penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019. Dengan demikian program dan kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (Renja).

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Binjai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (19) Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsidan Kabupaten/ Kota;
- (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodeflasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (30) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (31) Permenpan Nomor. PER/ 05/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (32) Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- (33) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- (34) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- (35) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
- (36) Peraturan Bupati Langkat No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.
- (37) Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah guna mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah :

1. Merumuskan program – program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
3. Menciptakan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi;
4. Menciptakan kesinambungan dan keselarasan program dan kegiatan Inspektorat Daerah dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Langkat 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum,
- 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menguraikan tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Langkat,
- 2.3. Isu – isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Inspektorat Kabupaten Langkat,
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang :

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,
- 3.3. Program dan Kegiatan.
- 3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : P E N U T U P



B A B II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun 2021 memuat 3 (tiga) program, 11 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/ hasil dari program/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020
Kabupaten Langkat

SKPD : Inspektorat Kabupaten Langkat				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2020)		
Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		3	4			Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Kode	2							
1.20		Urusan Wajib						
1.20	07	Bidang Pemerintahan						
	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air selama 12 bulan	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100%	
	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian bahan habis pakai dan meterai	32 jenis	32 jenis	32 jenis	100%	
	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian lampu pijar, baterai dan lain-lain	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100%	
	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan kebersihan dan rumah tangga.	27 jenis	27 jenis	27 jenis	100%	
	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	2 jenis	2 jenis	1 jenis	50%	
	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum tamu dan peserta rapat.	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	
	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pengawasan	34 orang	10 orang	10 orang	100%	
	01	Penyediaan jasa Administrasi Umum	Tersedianya supir, petugas kebersihan, operator, dan penjaga malam.	19 orang	19 orang	19 orang	100%	
	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	
	02	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Tersedianya peralatan gedung kantor	13 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	
	02	Pengadaan Meubiler	Tersedianya meubiler	9 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	
	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	
	02	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terawatnya kendaraan dinas/ operasional.	12 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	
	02	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung	Terawatnya peralatan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	

		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	100%	100%	100%
22	22	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP menuju level 3	Level 3	Level 3	100%
22	27	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Maturitas SPIP menuju level 3	Level 3	Level 3	100%
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%
		Penyusunan LKPJ	Tersusunnya LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan Laki	Nilai Evaluasi Laki	Bernilai 50	Bernilai 55,32	110,64%
		Penyusunan LPPD	Tersusunnya LPPD Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyusunan RENJA OPD	Jumlah Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyusunan RENSTRA OPD	RENSTRA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA OPD	Jumlah RKA, dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	100%

P

		01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen												
	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah renja / renja perubahan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Renstra Perangkat Daerah / Renstra Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100%	-	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah KUA-PPAS dan RKA perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Perubahan KUA- PPAS dan Perubahan RKA perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Anggaran Kas dan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Anggaran Kas Perubahan dan Perubahan DPA perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	*CC Nilai 60	*CC Nilai 60	*CC Nilai 50	*CC Nilai 55,32	*CC Nilai 55,32	110%	*CC Nilai 55,32	*CC Nilai 55,32	110%	*CC Nilai 55,32	*CC Nilai 55,32	110%	
	01	201	08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LKPJ perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	01	201	09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LPPD perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	01	201	10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	01	202	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	01	202	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	01	202	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	01	202	04	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	

	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	01	202	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran perangkat daerah	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Triwulan dan prognosis	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%
	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang selesai tepat waktu	3 Dokumen							
	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset tetap dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Mutasi Bulanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pendistribusian BMD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Meningkatkan kompetensi pegawai - Peningkatan dan kelancaran tugas pegawai								
	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) pegawai Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	75 Stel	52 Stel	63 Stel	61 Stel	48,41%	63 Stel	58 Stel	100%
						70 Stel	39 Stel	55 Stel	-				

	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Daftar Urut Kepegawaian (DUK)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Simpeg	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya nilai angka kredit pejabat fungsional	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman peserta diklat, bimtek, seminar, workshop, sosialisasi dan lainnya	70 Kali	2 Paket	12 Orang	16 Orang	133,33%	40 Orang	40 Orang	100%
	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan bimtek/ pelatihan kantor sendiri (PKS) bagi APIP	2 Kali	16 Jenis	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%							
	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang digunakan	5 Jenis	14 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan	40 Jenis	40 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100%	40 Jenis	40 Jenis	100%
	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan alat rumah tangga, alat kebersihan dan bahan pembersih.	17 Jenis	30 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	100%	17 Jenis	17 Jenis	100%
	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi makan minum pegawai, peserta rapat, tamu dan penambah daya tahan tubuh pegawai Non PNS.	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	6 Jenis, 1 paket	9Jenis	9Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD, koordinasi dan konsultasi pengawasan antar APIP Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Pusat dan BPKP.	12 Bulan	1 paket	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis								
01	207		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	4 Unit	-	-	-	-	-	-	1 Jenis	100%
01	207		Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan meubelur	5 Jenis	9 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	100%	2 Jenis	100%
01	207		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	7 Jenis	17 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	100%	5 Jenis	100%
01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan								
01	208		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa penggunaan energi	12 Bulan	48 Rekening	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	100%	3 Jenis	100%
01	208		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa yang dibayarkan kepada PPK, Pejabat pengadaan barang, Pengurus barang, dan Pegawai Non PNS.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	12 bulan	100%
01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%								
01	209		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	19 Unit	16 unit kendaraan dinas	11 Jenis	11 Jenis	100%	11 Jenis	100%	11 Jenis	100%
01	209		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan gedung kantor	3 Jenis	4 paket	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	100%	3 Jenis	100%
01	209		Pemeliharaan Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	1 unit	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	100%	-	-
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan perencanaan pengawasan	100%								
02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP yang diterbitkan selama 1 tahun	9 LHP								
				Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	108 Obrik	15 Jenis	1502 Jumlah Obrik	1003 Jumlah Obrik	64%	1502 Jumlah Obrik	100%	1502 Jumlah Obrik	100%
02	201		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	22%	-	20%	20%	-	21%	-	21%	100%

						Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	171 Jumlah Obrik	15 Jenis	1502 Jumlah Obrik	1003 Jumlah Obrik	64%	1502 Jumlah Obrik	1502 Jumlah Obrik	100%
02	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	02	02	Reviu Laporan Keuangan	Tertaksananya reviu LKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
02	02	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	02	02	07	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	85%	82%	80%	80%	100%	82%	82%	100%
02	02		02	02		Terselenggaranya kegiatan gelar pengawasan daerah	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
02	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	02	02		Persentase Kasus dan Dumas yang ditangani	80%							
02	02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	02	02	01	Persentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	-	-	-
02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	02	02	02	Persentase Kasus dan Dumas yang tertangani	75%	70%	65%	99,9%	154%	70%	70%	100%
03	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	03	03		Cakupan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%							
03	03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	03	03	201	Terlaksananya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dibidang Pengawasan	100%							
03	03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	03	03	01	Tersusunnya program kerja pemeriksaan tahunan	1 Dokumen Level 3	1 Dokumen Level 3	1 Dokumen Level 3	1 Dokumen Level 3	100%	1 Dokumen Level 3	1 Dokumen Level 3	100%
03	03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	03	03	02	Tingkat Kapabilitas APIP	1 Aplikasi Level 3	15 Jenis	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
03	03	Pendampingan dan Asistensi	03	03	202	Cakupan pelaksanaan pendampingan dan asistensi	100%							
03	03	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	03	03	01	Terkelaksananya bimbingan teknis bagi OPD	1 Kali Level 3	2 Kali	1 Kali Level 3	1 Kali Level 3	100%	2 Kali Level 3	2 Kali Level 3	100%
03	03	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	03	03	02	Tingkat Maturitas SPIP	1 LHR	-	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	1 LHR	100%

				Pelaksanaan Implementasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP)	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 70	100%	100%
				Unit Pengendali Graufikasi	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	100%
				Tertaksananya Kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kabupaten Langkat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	100%
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
				Terhimpunnya data populasi Survey Penilaian Integritas	90%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%
				Tersedianya Perangkat Daerah sebagai pilot Project pembangunan Zona Integritas menuju WBBM/WBBK	1 PD	-	-	-	-	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	03	03	03	03	03	03	03	03
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	03	03	03	03	03	03	03	03

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Inspektorat digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra dan/ atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Langkat sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di lingkungan Pemerintah Daerah harus melakukan sinergi yang baik dengan instansi pengawas di pemerintahan pusat dan propinsi dan juga harus berkoordinasi dengan aparat pengawas eksternal.

Untuk dapat mengetahui dan mengukur keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan harus dirumuskan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Penetapan Indikator tersebut diperlukan sebagai pedoman dan alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran melalui strategi yang telah diperoleh. Indikator tersebut harus memiliki besaran target yang akan dicapai. Realisasi pencapaian target indikator digunakan dan sebagai bahan pertanggung jawaban keuangan pencapaian sasaran dan sebagai bahan perbaikan maupun peningkatan pelaksanaan strategi pencapaian sasaran yang telah dipilih.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Langkat berupa analisis sasaran strategi sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Langkat, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel TC-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Langkat

No	Indikator	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Nilai Evaluasi Lakip Inspektorat	Nilai (AA,A,B,CC,C,D)		B (60)	B (60)	B (60)	B (60)	CC(55,32)	-	B (60)	B (60)		Belum Tercapai
B	Pengawasan												
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	-	Level 3	Level 3		Belum Tercapai
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	-	Level 3	Level 3		Belum Tercapai
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan (Keuangan Negara/ Daerah dan Administrasi)	Persen (%)		80	82	85	87	83	-	85	87		Tercapai

[Handwritten signature]

2.3. ISU – ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Namun, pada perkembangannya akan selalu muncul permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

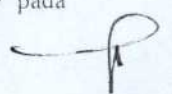
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/ Walikota dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan dan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan internal, meliputi: kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Dari segi fungsi manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian tujuan dan sasaran program-program Pemerintah Daerah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam APBD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Inspektorat lebih mengedepankan upaya pencegahan (preventif) dan korektif daripada tindakan represif atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Langkat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Langkat tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melengkapinya. Isu strategis dimaksud antara lain :

1. Penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah masih lemah.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah adalah mendapat opini WTP dari BPK. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Langkat telah berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 dari BPK. Namun Inspektorat Kabupaten Langkat masih harus membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah. APIP juga dituntut melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi sesuai dengan target indicator kinerja bidang Aparatur Negara.



2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adanya tuntutan peningkatan kinerja pengawasan agar lebih optimal mendorong Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitas APIPnya. Kondisi ini harus didukung oleh kompetensi SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang cukup. Alokasi dana untuk peningkatan kompetensi APIP yang masih belum memadai serta kuantitas SDM Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan juga merupakan akar masalah yang harus diselesaikan.

3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan belum optimal.

Capaian penyelesaian Tindak Lanjut yang belum optimal dikarenakan masih rendahnya tingkat kepedulian Perangkat Daerah dalam penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan dan juga dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang menangani Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tersebut.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/ RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan. Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Berikut ini diuraikan tentang perbandingan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, yaitu :



Tabel TC-31
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
 Kabupaten Langkat

SKPD : Inspektorat Kabupaten Langkat

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	
BELANJA					19.693.687.328	BELANJA					19.693.687.328
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	• Cakupan pelayanan administrasi perkantoran • Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur • Cakupan peningkatan dan kelancaran tugas pegawai • Cakupan peningkatan kompetensi pegawai • Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu • Persentase laporan aset/barang daerah yang diterbitkan tepat waktu • Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100%	13.174.883.356	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	• Cakupan pelayanan administrasi perkantoran • Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur • Cakupan peningkatan dan kelancaran tugas pegawai • Cakupan peningkatan kompetensi pegawai • Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu • Persentase laporan aset/barang daerah yang diterbitkan tepat waktu • Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100%	13.174.883.356	
1.a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	21.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	21.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah renja atau renja perubahan perangkat daerah	1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah renja atau renja perubahan perangkat daerah	2 Dokumen	3.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah KUA-PPAS dan RKA perangkat daerah	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah KUA-PPAS dan RKA perangkat daerah	2 Dokumen	4.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RKA perangkat daerah	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RKA perangkat daerah	2 Dokumen	4.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Anggaran Kas dan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Anggaran Kas dan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Anggaran Kas Perubahan dan Perubahan DPA perangkat daerah	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Anggaran Kas Perubahan dan Perubahan DPA perangkat daerah	1 Dokumen	3.000.000	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Nilai evaluasi lakip	Nilai 60	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Nilai evaluasi lakip	Nilai 60	
									1 Dokumen	1 Dokumen
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Tersusunnya LKPJ perangkat daerah	1 Dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Tersusunnya LKPJ perangkat daerah	1 Dokumen	3.000.000
		Inspektorat	Tersusunnya LPPD perangkat daerah	1 Dokumen			Inspektorat	Tersusunnya LPPD perangkat daerah	1 Dokumen	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Renja	4 Laporan	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Renja	4 Laporan	1.500.000
1.b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	3 dokumen	10.628.466.469	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	3 dokumen	10.628.466.469
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Tersedianya gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja pegawai	12 bulan	10.426.826.469	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Tersedianya gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja pegawai	12 bulan	10.426.826.469
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk pengelola keuangan	12 Bulan	188.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk pengelola keuangan	12 Bulan	188.640.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	3.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	3.000.000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Inspektorat	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Bulan	3.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Inspektorat	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Bulan	3.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan	4.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah	14 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah	14 Laporan	1.500.000
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	Laporan Realisasi Triwulan dan prognosis	4 laporan	1.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	Laporan Realisasi Triwulan dan prognosis	4 laporan	1.500.000
1.c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang selesai tepat waktu	3 dokumen	7.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang selesai tepat waktu	3 dokumen	7.500.000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Daerah	2 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Daerah	1 Dokumen	1.500.000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset tetap dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset tetap dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.500.000

3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Mutasi Bulanan	12 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Mutasi Bulanan	12 Laporan	2.000.000
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Jumlah Pendistribusian BMD	12 Laporan	1.500.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Jumlah Pendistribusian BMD	12 Keg	1.500.000
I.d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	- Meningkatkan kompetensi pegawai - Peningkatan dan kelancaran tugas pegawai	100%	9736.762.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	- Meningkatkan kompetensi pegawai - Peningkatan dan kelancaran tugas pegawai	100%	9736.762.500
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) pegawai Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	75 Stel 70 Stel	97.762.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) pegawai Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	75 Stel 70 Stel	97.762.500
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Dokumen	2.000.000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Simpeg	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Simpeg	1 Dokumen	2.000.000
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	Tersedianya nilai angka kredit pejabat fungsional	2 Periode	35.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	Tersedianya nilai angka kredit pejabat fungsional	2 Periode	35.000.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Pengiriman peserta diklat, bimtek, seminar, workshop, sosialisasi dan lainnya	70 kali	400.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Pengiriman peserta diklat, bimtek, seminar, workshop, sosialisasi dan lainnya	70 kali	400.000.000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Penyelenggaraan bimtek/ pelatihan kantor sendiri (PKS) bagi APIP	2 kali	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Penyelenggaraan bimtek/ pelatihan kantor sendiri (PKS) bagi APIP	2 kali	200.000.000
I.e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	632.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	632.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah komponen listrik yang digunakan	5 Jenis	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah komponen listrik yang digunakan	5 Jenis	5.500.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan	40 Jenis	58.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan	40 Jenis	58.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Tersedianya kebutuhan alat rumah tangga, alat kebersihan dan bahan pembersih.	17 Jenis	8.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Tersedianya kebutuhan alat rumah tangga, alat kebersihan dan bahan pembersih.	17 Jenis	8.500.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Terperuhnya makan minum pegawai, peserta rapat, tamu dan penambah daya tahan tubuh pegawai Non PNS.	6 Jenis	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Terperuhnya makan minum pegawai, peserta rapat, tamu dan penambah daya tahan tubuh pegawai Non PNS.	6 Jenis	120.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	22.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	22.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Tersedianya referensi bahan bacaan	1 Jenis	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Tersedianya referensi bahan bacaan	1 Jenis	18.000.000

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD, koordinasi dan konsultasi pengawasan antar APIP Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Pusat dan BPKP.	12 bulan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD, koordinasi dan konsultasi pengawasan antar APIP Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Pusat dan BPKP.	12 bulan	400.000.000
I.f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	380.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	380.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Tersedianya kendaraan dinas operasional	4 unit	145.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Tersedianya kendaraan dinas operasional	4 unit	145.000.000
2	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Tersedianya pengadaan meubléur	5 Jenis	110.000.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Tersedianya pengadaan meubléur	5 Jenis	110.000.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Tersedianya peralatan gedung kantor	7 Jenis	125.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Tersedianya peralatan gedung kantor	7 Jenis	125.000.000
I.g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	300.540.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	300.540.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jasa penggunaan energi	12 bulan	154.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jasa penggunaan energi	12 bulan	154.440.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah jasa yang dibayarkan kepada PPK, Pejabat pengadaan barang, Pengurus barang, dan Pegawai Non PNS.	153 OB	146.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah jasa yang dibayarkan kepada PPK, Pejabat pengadaan barang, Pengurus barang, dan Pegawai Non PNS.	153 OB	146.100.000
I.h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	468.114.387	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	468.114.387
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Terawatnya kendaraan dinas/ operasional	19 unit	263.114.387	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Terawatnya kendaraan dinas/ operasional	19 unit	263.114.387
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Terawatnya peralatan gedung kantor	4 Jenis	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Terawatnya peralatan gedung kantor	4 Jenis	30.000.000
3	Pemeliharaan Gedung Kantor	Inspektorat	Terawatnya gedung kantor	1 Paket	175.000.000	Pemeliharaan Gedung Kantor	Inspektorat	Terawatnya gedung kantor	1 Paket	175.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Cakupan penyelenggaraan perencanaan pengawasan	100%	5.555.319.472	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Cakupan penyelenggaraan perencanaan pengawasan	100%	5.555.319.472
II.a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah LHP yang diterbitkan selama itahun	90 LHP	4.149.409.472	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah LHP yang diterbitkan selama itahun	90 LHP	4.149.409.472

1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektoral	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai dengan nilai B	108 Obrik 22%	1.200.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektoral	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	108 Obrik 22%	1.200.000.000
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektoral	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	171 Obrik	2.754.369.472	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektoral	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	171 Obrik	2.754.369.472
3	Reviu Laporan Keuangan	Inspektoral	Terlaksananya reviu LKPD	1 Laporan	71.040.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektoral	Terlaksananya reviu LKPD	1 Laporan	71.040.000
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektoral	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	85%	124.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektoral	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	85%	124.000.000
			- Terselenggaranya kegiatan gelar pengawasan daerah	2 kali				- Terselenggaranya kegiatan gelar pengawasan daerah	2 kali	
III.b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral	Persentase Kasus dan Dumas yang ditangani	80%	1.405.910.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral	Persentase Kasus dan Dumas yang ditangani	80%	1.405.910.000
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Inspektoral	Persentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	81.230.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Inspektoral	Persentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	81.230.000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral	Persentase Kasus dan Dumas yang tertangani	75%	1.324.680.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektoral	Persentase Kasus dan Dumas yang tertangani	75%	1.324.680.000
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektoral	Cakupan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%	963.484.500	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektoral	Cakupan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%	963.484.500
III.a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral	Terlaksananya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dibidang Pengawasan	100%	190.834.400	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral	Terlaksananya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dibidang Pengawasan	100%	190.834.400
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektoral	Tersusunnya program kerja pemeriksaan tahunan	1 Dokumen	70.834.400	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektoral	Tersusunnya program kerja pemeriksaan tahunan	1 Dokumen	70.834.400
			Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3				Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral	Tersedianya aplikasi sistem informasi pengawasan	1 aplikasi	120.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektoral	Tersedianya aplikasi sistem informasi pengawasan	1 aplikasi	120.000.000
III.b	Pendampingan dan Asistensi	Inspektoral	Cakupan pelaksanaan pendampingan dan asistensi	100%	772.650.100	Pendampingan dan Asistensi	Inspektoral	Cakupan pelaksanaan pendampingan dan asistensi	100%	772.650.100
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral	Terlaksananya bimbingan teknis bagi OPD	1 Kali	185.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral	Terlaksananya bimbingan teknis bagi OPD	1 Kali	185.000.000
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	
2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektoral	Terevaluasinya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten langkat	1 LHR	112.650.100	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektoral	Terevaluasinya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten langkat	1 LHR	112.650.100

3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Pelaksanaan Implementasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP)	Nilai 70	325.000.000	Inspektorat	Pelaksanaan Implementasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP)	Nilai 70	325.000.000
			Unit Pengendali Gratifikasi	4 laporan			Unit Pengendali Gratifikasi	4 laporan	
			Terlaksananya Kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kabupaten Langkat	4 laporan			Terlaksananya Kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kabupaten Langkat	4 laporan	
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	1 Dokumen			Indeks Persepsi Anti Korupsi	1 Dokumen	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	325.000.000	Inspektorat	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Terhimpunnya data populasi Survey Penilaian Integritas	90%	150.000.000
							- Tersedianya Perangkat Daerah sebagai pilot Project pembangunan Zona Integritas menuju WBBM/ WBBK	1 PD	

Berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan. Oleh karena itu, pada rancangan awal RKPD tahun 2022 ini ditambahkan sub kegiatan Penganan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2019 - 2024.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan rutin dilengkapi dengan program dan kegiatan yang terkait dengan pengawasan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan program kerja pemeriksaan yang telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Langkat mencakup lingkup pembinaan dan pengawasan serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung tidak ada, namun masyarakat dapat mengajukan laporan atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ khusus/ kasus.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Langkat, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah mempunyai kewajiban untuk:

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sitem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yang mendorong masyarakat taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN merupakan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Inspektorat Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan pembangunan daerah, diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati agar berjalan sesuai aturan. Berdasarkan visi dan misi Bupati Langkat tahun 2019 – 2024, maka Inspektorat Kabupaten Langkat sesuai dengan fungsi dan tugasnya mendukung misi kelima yaitu: Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang memiliki tujuan: Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, serta memiliki sasaran: Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian sasaran Inspektur Kabupaten Langkat, maka dirumuskan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari:
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari:
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi

Rumusan program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Inspektorat Kabupaten Langkat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		Inspektorat		6,518,803,972	APBD		7,170,684,369	
6 01	Inspektorat		Inspektorat		6,518,803,972	APBD		7,170,684,369	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan perencanaan pengawasan	Inspektorat	100%	5,555,319,472	APBD	100%	6,110,851,419	
02 201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP yang diterbitkan selama 1 tahun	Inspektorat	90 LHP	4,149,409,472	APBD	90 LHP	4,564,350,419	
02 201 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	Inspektorat	108 Obrik	1,200,000,000	APBD	108 Obrik	1,320,000,000	
		Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	Inspektorat	22%			22%		
02 201 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	Inspektorat	171 Obrik	2,754,369,472	APBD	171 Obrik	3,029,806,419	
02 201 04	Reviu Laporan Keuangan	Tertaksananya reviu LKPD	Inspektorat	1 Laporan			1 Laporan		
02 201 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Terselenggaranya kegiatan gelar pengawasan daerah	Inspektorat	85%	124,000,000	APBD	85%	136,400,000	
			Inspektorat	2 kali			2 kali		

3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Langkat dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, serta visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja Inspektorat Kabupaten Langkat sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Renja tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat. Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Langkat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		Inspek torat		19.693.687.328	AP BD	
6 0 1	Inspektorat		Inspek torat		19.693.687.328	AP BD	
6 0 1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	• Cakupan pelayanan administrasi perkantoran • Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur • Cakupan peningkatan dan kelancaran tugas pegawai • Cakupan peningkatan kompetensi pegawai • Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu • Persentase laporan aset/barang daerah yang diterbitkan tepat waktu • Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	Inspek torat	100%	13.174.883.356	AP BD	

		01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	9 dokumen	21.500.000	AP BD	
		01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah renja atau renja perubahan perangkat	Inspektoralat	1 Dokumen	3.000.000	AP BD	
		01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah KUA-PPAS dan RKA perangkat daerah	Inspektoralat	2 Dokumen	4.000.000	AP BD	
		01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RKA perangkat daerah	Inspektoralat	2 Dokumen	4.000.000	AP BD	
		01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Anggaran Kas dan DPA Perangkat Daerah	Inspektoralat	1 Dokumen	3.000.000	AP BD	
		01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Anggaran Kas Perubahan dan Perubahan DPA perangkat daerah	Inspektoralat	1 Dokumen	3.000.000	AP BD	
		01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi lakip	Inspektoralat	Nilai 60	3.000.000	AP BD	
						Tersusunnya LKPJ perangkat daerah	Inspektoralat	1 Dokumen			
						Tersusunnya LPPD perangkat daerah	Inspektoralat	1 Dokumen			
		01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja	Inspektoralat	4 Laporan	1.500.000	AP BD	
		01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	Inspektorat	3 dokumen	10.628.466.469	AP BD	
		01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja pegawai	Inspektoralat	12 bulan	10.426.826.469	AP BD	
		01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk pengelola keuangan	Inspektoralat	12 Bulan	188.640.000	AP BD	
		01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Inspektoralat	12 Bulan	3.000.000	AP BD	
		01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD	Inspektoralat	12 Bulan	3.000.000	AP BD	
		01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Inspektoralat	1 Laporan	4.000.000	AP BD	
		01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah	Inspektoralat	14 Laporan	1.500.000	AP BD	
		01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Triwulan dan prognosis	Inspektoralat	8 laporan	1.500.000	AP BD	
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang selesai tepat waktu	Inspektorat	3 dokumen	7.500.000	AP BD	
		01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD)	Inspektoralat	2 Dokumen	1.500.000	AP BD	

	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset tetap dan Laporan Barang Milik Daerah	Inspekt orat	2 Dokumen	2.500.000	AP BD	
	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Mutasi Bulanan	Inspekt orat	12 Laporan	2.000.000	AP BD	
	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pendistribusian BMD	Inspekt orat	12 Laporan	1.500.000	AP BD	
	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Meningkatnya kompetensi pegawai - Peningkatan dan kelancaran tugas pegawai	Inspek torat	100%	736.762.500	AP BD	
	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) pegawai Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Inspekt orat Inspekt orat	75 Stel 70 Stel	97.762.500	AP BD	
	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Inspekt orat	1 Dokumen	2.000.000	AP BD	
	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Simpeg	Inspekt orat	1 Dokumen	2.000.000	AP BD	
	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya nilai angka kredit pejabat fungsional	Inspekt orat	2 Periode	35.000.000	AP BD	
	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman peserta diklat, bimtek, seminar, workshop, sosialisasi dan lainnya	Inspekt orat	70 kali	400.000.000	AP BD	
	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan bimtek/ pelatihan kantor sendiri (PKS) bagi APIP	Inspekt orat	2 kali	200.000.000	AP BD	
	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Inspek torat	100%	632.000.000	AP BD	
	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang digunakan	Inspekt orat	5 Jenis	5.500.000	AP BD	
	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan	Inspekt orat	40 Jenis	58.000.000	AP BD	
	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan alat rumah tangga, alat kebersihan dan bahan pembersih.	Inspekt orat	17 Jenis	8.500.000	AP BD	
	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya makan minum pegawai, peserta rapat, tamu dan penambah daya tahan tubuh pegawai Non PNS.	Inspekt orat	6 Jenis	120.000.000	AP BD	
	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Inspekt orat	6 Jenis	22.000.000	AP BD	
	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan	Inspekt orat	1 Jenis	18.000.000	AP BD	

		01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD, koordinasi dan konsultasi pengawasan antar APIP Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Pusat dan BPKP.	Inspekt orat	12 bulan	400.000.000	AP BD	
		01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Inspek torat	9 Jenis	380.000.000	AP BD	
		01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Inspekt orat	4 unit	145.000.000	AP BD	
		01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan meubileur	Inspekt orat	5 Jenis	110.000.000	AP BD	
		01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	Inspekt orat	7 Jenis	125.000.000	AP BD	
		01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Inspek torat	12 bulan	300.540.000	AP BD	
		01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa penggunaan energi	Inspekt orat	12 bulan	154.440.000	AP BD	
		01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa yg dibayarkan kepada PPK, Pejabat pengadaan barang, Pengurus barang, dan Pegawai Non PNS	Inspekt orat	153 OB	146.100.000	AP BD	
		01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Inspek torat	100%	468.114.387	AP BD	
		01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terawatnya kendaraan dinas/ operasional	Inspekt orat	11 Jenis	263.114.387	AP BD	
		01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan gedung kantor	Inspekt orat	4 Jenis	30.000.000	AP BD	
		01	209	09	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	Inspekt orat	1 Paket	175.000.000	AP BD	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan perencanaan pengawasan	Inspek torat	100%	5.555.319.472	AP BD	
		02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP yang diterbitkan selama 1 tahun	Inspek torat	90 LHP	4.149.409.472	AP BD	
		02	201	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	Inspekt orat	108 Obrik	1.200.000.000	AP BD	
					Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	Inspekt orat	22%				
		02	201	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	Inspekt orat	171 Obrik	2.754.369.472	AP BD	
		02	201	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu LKPD	Inspekt orat	1 Laporan	71.040.000	AP BD	
		02	201	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Inspekt orat	85%	124.000.000	AP BD	
					Terselenggaranya kegiatan gelar pengawasan daerah	Inspekt orat	2 kali				

	02	202		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus dan Dumas yang ditangani	Inspek torat	80%	1.405.910.000	AP BD	
	02	202	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Persentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	Inspekt orat	100%	81.230.000	AP BD	Sebe lumn ya di BPK AD
	02	202	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus dan Dumas yang tertangani	Inspekt orat	75%	1.324.680.000	AP BD	
	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspek torat	100%	963.484.500	AP BD	
	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dibidang Pengawasan	Inspek torat	100%	190.834.400	AP BD	
	03	201	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya program kerja pemeriksaan tahunan	Inspekt orat	1 Dokumen	70.834.400	AP BD	
					Tingkat Kapabilitas APIP	Inspekt orat	Level 3			
	03	201	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersedianya aplikasi sistem informasi pengawasan	Inspekt orat	1 aplikasi	120.000.000	AP BD	
	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Inspek torat	100%	772.650.100	AP BD	
	03	202	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis OPD	Inspekt orat	1 Kali	185.000.000	AP BD	
					Tingkat Maturitas SPIP	Inspekt orat	Level 3			
	03	202	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terevaluasinya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemkab Langkat	Inspekt orat	1 LHR	112.650.100		
	03	202	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaksanaan Implementasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP)	Inspekt orat	Nilai 70	325.000.000	AP BD	
					Unit Pengendali Gratifikasi	Inspekt orat	4 laporan			
					Terlaksananya Kegiatan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Kab. Langkat	Inspekt orat	4 laporan			
					Indeks Persepsi Anti Korupsi	Inspekt orat	1 Dokumen			
	03	202	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terhimpunnya data populasi Survey Penilaian Integritas	Inspekt orat	90%	150.000.000	AP BD	
					Tersedianya Perangkat Daerah sebagai pilot Project pembangunan Zona Integritas menuju WBBM/ WBBK	Inspekt orat	1 PD		AP BD	

Terdapat penambahan pagu anggaran indikatif tahun 2022 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah SDM dan kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang berbunyi bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/ Walikota dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan dan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



B A B V

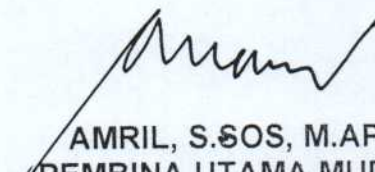
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2021 ini disusun, Rencana Kerja yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Langkat. Rencana Kerja ini kiranya juga dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Langkat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Stabat, 29 April 2021

INSPEKTUR KABUPATEN LANGKAT



AMRIL, S.SOS, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690927 199102 1 001.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
INSPEKTORAT

JALAN IMAM BONJOL NO. 61 TELP. 8910514 FAX (061) 8910514
S T A B A T

Stabat, 29 April 2021

Nomor : 900.266.A/insp/wr
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Renja
Inspektorat Kabupaten Langkat
Tahun 2022

Kepada Yth:
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Langkat
di -
Tempat

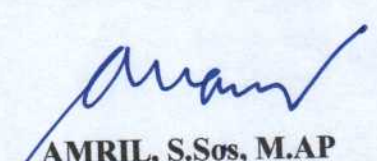
Sehubungan dengan surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat nomor 050-149/BPP-LKT/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Penyampaian Renja RKPD Tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Renja Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun 2022	1 (satu) berkas	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN LANGKAT

4/29/21
Roni


AMRIL, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690927 199102 1 001